

Nama : Annisa Yulianti
NPM : 2313031062
Kelas : 2023 C
Dosen Pengampu : 1. Dr. Pujiati, M.Pd.
2. Dr. Meyta Pritandhari, M.Pd.
3. Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.

UAS Ekonomi Pendidikan

Pertanyaan No. 1- Efisiensi Anggaran Pendidikan

1. Efisiensi Internal dan Eksternal

Efisiensi Internal

Efisiensi Internal Pendidikan berkaitan dengan bagaimana input pendidikan seperti dana, guru, serta fasilitas yang dikelola di dalam sistem untuk menghasilkan output seperti kelulusan, nilai, dan kompetensi yang maksimal tanpa ada pemborosan. Dalam kasus yang dipaparkan dijelaskan bahwa kabupaten A gagal mencapai efisiensi internal. Angka partisipasi sekolah (APS) memang naik karena gedung baru mampu menampung lebih banyak siswa (aksesibilitas terpenuhi). Namun, karena dana untuk komponen penting seperti pelatihan guru, kurikulum, dan media digital sangat minim, proses belajar-mengajar di dalam kelas tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya *misallocation of resources* (salah alokasi sumber daya). Gedung sekolah yang bagus menjadi sia-sia secara fungsional jika di dalamnya siswa diajar oleh guru yang kurang terlatih dan masih menggunakan metode pembelajaran yang jadul/monoton. Maka input anggaran yang besar tidak linier dengan kualitas output hasil belajar yang diterima.

Efisiensi Eksternal

Efisiensi Eksternal Pendidikan mengacu pada sejauh mana output dari sistem pendidikan (lulusan) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,

dunia kerja, atau jenjang pendidikan berikutnya. Jika kualitas hasil belajar siswa stagnan selama 5 tahun, maka hal ini dapat dipastikan efisiensi eksternalnya juga akan buruk. Dalam kasus ini lulusan dari Kabupaten A kemungkinan besar akan kalah bersaing di pasar kerja atau seleksi perguruan tinggi karena mereka tidak dibekali dengan keterampilan yang relevan (seperti literasi digital dan *critical thiking*) yang seharusnya didapat dari kurikulum dan media belajar yang modern. Dengan kata lain anggaran 30% APBD tersebut gagal mentransformasikan siswa untuk menjadi *human capital* yang produktif dan siap pakai sesuai tuntutan zaman.

2. Dampak terhadap Kualitas SDM

Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan sarana fisik dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun akses pendidikan meningkat, kualitas kompetensi siswa berpotensi tetap rendah karena proses pembelajaran tidak mengalami banyak perbaikan. Guru yang kurang mendapatkan pelatihan akan kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, sementara keterbatasan media pembelajaran digital dapat menghambat penguasaan teknologi dan keterampilan abad ke-21 oleh siswa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghasilkan lulusan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi secara formal, tetapi belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja maupun perkembangan ekonomi modern. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah juga dapat terhambat.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk membenahi kasus ini, Pemerintah Kabupaten A perlu menerapkan alokasi anggaran yang lebih seimbang antara pembangunan fisik dan peningkatan mutu pendidikan. serta juga perlu meningkatkan investasi pada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, penyempurnaan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta penyediaan media pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, evaluasi penggunaan anggaran

perlu dilakukan secara berkala agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Pertanyaan No.2- Ketimpangan Akses Pendidikan

1. Bentuk Ketimpangan Pendidikan dalam Kasus Tersebut

Kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan yang terjadi dalam bentuk ketimpangan sarana pendidikan dan ketimpangan mutu pembelajaran. Perbedaan ini terlihat dari kondisi sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas pendukung belajar yang lebih lengkap, seperti laboratorium dan jaringan internet yang memadai. Sementara itu, sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Selain fasilitas, ketimpangan juga terjadi pada aspek tenaga pendidik. Sekolah di perkotaan cenderung lebih mudah memperoleh guru yang berkualitas dan berpengalaman, sedangkan sekolah di pedesaan sering mengalami kekurangan guru serta keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pembelajaran yang diterima siswa menjadi berbeda. Ketimpangan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kesenjangan antarwilayah. Letak geografis yang berbeda membuat akses terhadap sumber daya pendidikan tidak merata. Akibatnya, siswa di daerah pedesaan memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan siswa di perkotaan. Perbedaan fasilitas, teknologi, dan kualitas tenaga pendidik tersebut pada akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa, yang terlihat dari rendahnya capaian ujian siswa di pedesaan dibandingkan dengan siswa di perkotaan.

2. Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Ketimpangan pendidikan yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat maupun daerah. Siswa di wilayah pedesaan yang memperoleh pendidikan dengan kualitas lebih rendah cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan

yang terbatas ketika memasuki dunia kerja. Akibatnya, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan tinggi menjadi lebih kecil dibandingkan lulusan dari wilayah perkotaan. Kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota. Daerah yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebaliknya, daerah yang tertinggal dalam bidang pendidikan akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonominya. Jika dilihat dari Teori Pertumbuhan Endogen (Paul Romer), pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika akses dan kualitas pendidikan tidak merata, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan juga menjadi tidak seimbang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah dan ketimpangan pembangunan akan semakin besar.

Solusi Kebijakan

Untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan pemerataan pendidikan melalui peningkatan fasilitas sekolah di daerah pedesaan, penyediaan akses internet yang memadai, serta pemerataan distribusi guru yang berkualitas. Selain itu, pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang masih tertinggal. Dengan kebijakan yang tepat, kesenjangan pendidikan dapat dikurangi sehingga kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih merata.

Pertanyaan No.3- Pengangguran Terdidik

- 1. Analisis Penyebab Pengangguran Terdidik Berdasarkan Teori *Human Capital***

Kasus tersebut menunjukkan adanya masalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch*). Meskipun jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh kualitas keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Akibatnya, banyak lulusan yang kesulitan memperoleh pekerjaan atau akhirnya bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Menurut Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Gary Becker, pendidikan merupakan bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas individu sehingga dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi di pasar kerja. Namun, pada kasus ini investasi pendidikan belum menghasilkan modal manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini dapat terjadi karena kurikulum yang kurang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja, minimnya pengalaman praktik selama masa studi, serta kurangnya penguasaan keterampilan yang saat ini banyak dibutuhkan, seperti kemampuan digital, komunikasi, dan pemecahan masalah. Akibatnya, meskipun lulusan memiliki ijazah pendidikan tinggi, mereka belum memiliki kompetensi yang dianggap relevan oleh perusahaan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan fenomena pengangguran terdidik.

2. Hubungan Pendidikan dan Pasar Kerja

Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Idealnya, lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga dapat terserap dengan baik di pasar tenaga kerja. Namun, pada kasus ini terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan dalam jumlah yang besar, tetapi kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, permintaan tenaga kerja dari industri tidak dapat dipenuhi oleh lulusan yang tersedia, meskipun jumlah pencari kerja terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya

menjalankan fungsinya sebagai penyedia tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan relevansi lulusan, perguruan tinggi perlu memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum maupun pelaksanaan program pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu diberikan lebih banyak kesempatan untuk mengikuti magang, praktik kerja lapangan, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pengembangan *soft skills* seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi juga perlu menjadi perhatian utama. Dengan adanya keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, lulusan akan memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan tuntutan industri sehingga peluang memperoleh pekerjaan menjadi lebih besar dan angka pengangguran terdidik dapat dikurangi.

Pertanyaan No.4- Kenaikan Biaya Pendidikan

1. Analisis Berdasarkan Konsep Pendidikan sebagai Barang Publik dan Barang Privat

Kasus kenaikan uang kuliah pada kasus ini dapat dianalisis melalui konsep pendidikan sebagai barang publik (*public good*) dan barang privat (*private good*). Sebagai barang privat, pendidikan memberikan manfaat langsung kepada individu yang menerimanya, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, peluang kerja, dan pendapatan di masa depan. Dari sudut pandang ini, universitas memiliki alasan untuk meningkatkan biaya pendidikan guna memperbaiki fasilitas kampus dan kualitas layanan akademik yang akan dinikmati oleh mahasiswa. Namun, pendidikan juga memiliki karakteristik sebagai barang publik karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan sosial. Oleh karena itu, ketika biaya pendidikan meningkat terlalu tinggi, akses masyarakat terhadap pendidikan menjadi terbatas, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bertentangan dengan tujuan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, kasus tersebut menunjukkan adanya dilema antara upaya peningkatan kualitas pendidikan dan menjaga akses pendidikan agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Dampak Sosial Ekonomi

Kenaikan biaya pendidikan yang cukup besar dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, keluarga dengan pendapatan rendah akan menghadapi beban finansial yang lebih berat untuk membiayai pendidikan anaknya. Tidak sedikit mahasiswa yang berisiko menunda kuliah, mengambil cuti akademik, bahkan menghentikan pendidikan karena keterbatasan biaya. Dari sisi sosial, kenaikan biaya pendidikan dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Mahasiswa dari keluarga mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan yang berarti, sedangkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu menghadapi kesulitan untuk memperoleh kesempatan yang sama. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat ketimpangan sosial karena pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk meningkatkan mobilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan Teori Kesempatan yang Sama (*Equality of Opportunity*), setiap individu seharusnya memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga. Kenaikan biaya yang tidak diimbangi dengan mekanisme bantuan pendidikan berpotensi mengurangi kesempatan tersebut dan menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan tinggi.

3. Perlunya Intervensi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan memiliki manfaat yang luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Jika akses pendidikan hanya bergantung pada kemampuan membayar individu, maka banyak calon mahasiswa yang berpotensi tidak dapat melanjutkan pendidikan meskipun memiliki kemampuan akademik yang baik. Intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, subsidi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, atau pengawasan terhadap kenaikan biaya pendidikan agar tetap berada dalam batas yang wajar. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong kerja sama antara perguruan tinggi dan berbagai pihak untuk menyediakan sumber pendanaan alternatif sehingga peningkatan kualitas kampus tidak sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa. Melalui intervensi tersebut, kualitas pendidikan tetap dapat ditingkatkan tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Dengan demikian, tujuan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan secara seimbang.

Pertanyaan No.5- Digitalisasi Pembelajaran

1. Analisis Menggunakan Konsep Biaya Pendidikan dan *Opportunity Cost*

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran digital tidak hanya menuntut kesiapan sekolah, tetapi juga kesiapan ekonomi keluarga siswa. Dalam konsep biaya pendidikan, biaya yang harus ditanggung peserta didik tidak hanya berupa uang sekolah, tetapi juga biaya pendukung seperti pembelian gawai, laptop, serta kuota internet yang diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran tambahan tersebut menjadi beban yang cukup besar. Selain itu, masalah ini juga dapat dianalisis menggunakan konsep *opportunity cost* (biaya peluang), yaitu nilai dari alternatif yang harus dikorbankan untuk memperoleh suatu pilihan. Dalam kasus ini, keluarga berpenghasilan rendah sering kali harus memilih antara memenuhi

kebutuhan pendidikan anak atau memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti makanan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Akibatnya, pendidikan tidak selalu menjadi prioritas utama karena adanya kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran digital secara optimal, bahkan ada yang mengalami penurunan partisipasi belajar.

2. Dampak Kesenjangan

Kesenjangan digital dapat menimbulkan perbedaan kualitas pembelajaran yang cukup signifikan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan siswa yang tidak memiliki akses yang memadai. Siswa yang didukung perangkat dan internet yang baik dapat mengikuti pembelajaran secara penuh, mengakses berbagai sumber belajar, serta berinteraksi dengan guru secara lebih efektif. Sebaliknya, siswa yang memiliki keterbatasan akses teknologi sering mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas, maupun memperoleh materi pembelajaran secara lengkap. Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan hasil belajar antar siswa semakin besar. Dalam jangka panjang, siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran berisiko memiliki kemampuan akademik yang lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan digital dapat memperlemah kualitas sumber daya manusia dan mengurangi pemerataan kesempatan pendidikan. Menurut Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*) dari James Coleman, keberhasilan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya dan dukungan yang dimiliki lingkungan sekitarnya. Ketika sebagian siswa tidak memiliki akses terhadap teknologi pembelajaran, mereka kehilangan salah satu sumber daya penting yang mendukung keberhasilan pendidikan.

Solusi Kebijakan

Untuk mengatasi kasus ini, pemerintah perlu memberikan bantuan perangkat belajar dan subsidi kuota internet bagi siswa dari keluarga kurang

mampu. Selain itu, perlu dilakukan pemerataan pembangunan infrastruktur internet, terutama di daerah yang masih memiliki akses jaringan terbatas. Sekolah juga dapat menyediakan alternatif pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti penggunaan modul cetak atau pembelajaran campuran (*blended learning*), sehingga siswa tetap dapat mengikuti proses belajar meskipun memiliki keterbatasan akses digital. Dengan kebijakan yang tepat, manfaat digitalisasi pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh siswa tanpa menimbulkan kesenjangan yang semakin besar dalam akses maupun kualitas pendidikan.